

FENOMENA PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERSPEKTIF NATURALIST INTELLIGENCE

**Juliana Fatmawati¹, Ibnu Elmi AS. Pelu², Erry Fitrya Primadhany³,
Ahmidi⁴**

IAIN Palangka Raya

Julianaafatmawati@gmail.com

ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id

Erry.fitrya@iain-palangkaraya.ac.id

ahmidiartikel@gmail.com

Naskah dikirim: 23/04/2025, direvisi: 12/02/2026, diterima: 03/08/2026

Abstract

This research examines women's participation in the 2024 Legislative Election in Central Kalimantan Province as a result of PKPU Number 10 of 2023 which stipulates that political parties must have a minimum of 30% women in their list of legislative candidates. This research will examine the role of women in elections and how local political dynamics influence their involvement through a qualitative approach using literature study methods (library study) to study the experiences, challenges and strategies of women in politics. The research results show that only 22.22% of women were elected as DPRD members, even though the quota for women's representation in the list of candidates has been fulfilled, in accordance with Central Kalimantan KPU Decree Number 35 of 2023. Women's involvement in politics continues to be hampered by several factors, including patriarchal culture, lack of support from political parties, and practical politics. In addition, this research found that female newcomers to the Central Kalimantan DPRD showed effective habituation in familiarizing themselves with political behavior that pushed them into parliament, while incumbent women used existing laws to maintain their position as DPRD members. The representation of women in Central Kalimantan in the 2024 legislative elections reflects the social and cultural factors that exist in the area, compared to the same level in other provinces such as West Papua (17.39%) and South Sulawesi (40%). Therefore, to increase women's participation in politics and create a more inclusive environment, political education, political party support, and gender awareness campaigns are necessary.

Keywords: *Political Participation, Political Behaviour, Naturalist Intelligence*

Abstrak

Penelitian ini menilik partisipasi perempuan dalam Pemilu Legislatif 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah akibat PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menetapkan jika partai politik harus memiliki minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Penelitian ini akan mengkaji peran perempuan dalam pemilu dan bagaimana dinamika politik lokal memengaruhi keterlibatan mereka melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library study) untuk mempelajari pengalaman, tantangan, dan strategi perempuan dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 22,22% perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD, meskipun kuota keterwakilan perempuan dalam daftar calon telah terpenuhi, sesuai dengan Keputusan KPU Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2023. Keterlibatan perempuan dalam politik terus dihalangi oleh beberapa faktor, termasuk budaya patriarki, tidak adanya dukungan dari partai politik, dan politik praktis. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pendatang baru perempuan dalam DPRD Kalimantan Tengah menunjukkan habituation yang efektif dalam pembiasaan perilaku politik yang mendorong mereka ke dalam parlemen, sedangkan perempuan incumbent menggunakan hukum yang ada untuk mempertahankan posisi mereka sebagai anggota DPRD. Keterwakilan perempuan di Kalimantan Tengah pada pemilu legislatif 2024 merefleksikan faktor sosial dan budaya yang ada di daerah tersebut, dibandingkan dengan tingkat yang sama di provinsi lain seperti Papua Barat (17,39%) dan Sulawesi Selatan (40%). Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, pendidikan politik, dukungan partai politik, dan kampanye kesadaran gender diperlukan.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Perilaku Politik, Naturalist Intelligence

A. Pendahuluan

Pemilu legislatif Indonesia adalah acara besar yang diadakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk provinsi, kabupaten, dan kota.¹ Sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk memberikan suara mereka secara langsung kepada partai politik dan calon anggota legislatif selama pemilu. Tidak hanya partai politik yang memenuhi persyaratan Komisi Pemilihan Umum yang

¹ Silvia Estefina Subitmele, "Pemilu Legislatif Adalah Momen Penting Dalam Sistem Demokrasi, Simak Perbedaannya," 17 Januari 2024, 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5507320/pemilu-legislatif-adalah-momen-penting-dalam-sistem-demokrasi-simak-perbedaannya>.

memiliki hak untuk menjadi peserta pemilu, tetapi juga orang-orang yang dapat mendaftarkan diri sebagai calon legislatif.²

Selain itu untuk mendorong kesetaraan gender dalam politik, juga telah diberlakukan undang-undang afirmatif, seperti kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif.³ Meskipun kuota ini telah terpenuhi selama tahap pencalonan, hasil pemilu sering menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang berhasil mencapai kursi legislatif masih jauh di bawah angka tersebut.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa masih ada masalah struktural dan budaya yang perlu diselesaikan untuk memastikan bahwa perempuan lebih banyak terlibat dalam politik.

Di Kalimantan Tengah berdasarkan Putusan KPU Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk 18 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024⁵ yang dimana pada tiap partai yang mengajukan calon legislatif, sudah berhasil memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30%. Lebih jauh lagi, pencapaian ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi perempuan di lembaga legislatif, sehingga mereka dapat lebih efektif mewakili dan memperjuangkan isu-isu penting bagi perempuan, seperti kesehatan, pendidikan, dan isu-isu sosial. Dengan mencapai kuota perempuan, partai politik telah menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan gender di arena

² Mabruri Pudyas Salim, "Pemilu Legislatif Adalah Pemilu Untuk Memilih Anggota? Pahami Sistemnya," 22 Februari 2024, 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5533574/pemilu-legislatif-adalah-pemilu-untuk-memilih-anggota-pahami-sistemnya>.

³ Ni Luh Arjani, "Kesetaraan Gender Di Bidang Politik Antara Harapan Dan Realita," *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 5, no. 1 (2021): 1–6.

⁴ Wery Gusmansyah, "Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2019).

⁵ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (2023).

politik. Pencapaian kuota ini juga mencerminkan kemajuan dalam perjuangan hak-hak perempuan dan peluang yang lebih setara dalam mengisi jabatan publik.

Sejarah dan budaya masyarakat di seluruh belahan dunia maupun di Indonesia, perempuan kerap kali menjadi perbincangan menarik yang selalu tidak pernah habis dibahas. Tentang budaya patriarki yang mengekang perempuan, kodrat dan kewajiban perempuan serta norma-norma sosial yang kebanyakannya menghakimi para perempuan.⁶ Perempuan umumnya dibatasi pada tugas-tugas rumah tangga seperti pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak, sedangkan laki-laki diharapkan mengambil peran kepemimpinan dan membuat Keputusan utama⁷. Menurut studi Ahmad Hariri Mohd Saat dan aihanah Azahari dalam jurnalnya yang berjudul “Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Islam: Kajian Kualitatif” tahun 2021, Masalah ini kembali muncul sebagai akibat dari budaya masyarakat Indonesia yang telah mengubah perspektif kaum laki-laki, membuat mereka percaya bahwa mereka memiliki hak istimewa atas perempuan. Ketidakadilan dan kesenjangan sosial disebabkan oleh sistem sosial budaya patriarki yang mendominasi masyarakat Indonesia⁸. Kebijakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan ini dan meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik.⁹

⁶ Handro Kurnia Sitorus et al., “Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 02 (2024).

⁷ Etika Rachmawati, Maulana Arief, and Widiyatmo Ekoputro, “Patriarki Sebagai Upaya Counter Hegemony Budaya Male Gaze Di Indonesia,” in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MAHASISWA KOMUNIKASI (SEMAKOM)*, vol. 2, 2024, 95–104.

⁸ A A Assidqi and T Ilham, “Hambatan Keterpilihan Perempuan Dalam Politik Lokal: Analisis Kegagalan Endang Kusumawaty Dalam Pemilihan Walikota Kota,” *Jurnal Syariah* 29, no. 3 (2024): 481–508, http://eprints.ipdn.ac.id/17839/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/17839/1/Ariq_Abrar_Assidqi_31.0255_HAMBATAN_KETERPILIHAN_PEREMPUAN_DALAM_POLITIK_LOKAL_ANALISIS_KEGAGALAN_ENDANG_KUSUMAWATY_DALAM_PEMILIHAN_WALIKOTA_PANGKALPINANG_TAHUN_2018.pdf.

⁹ Susi Widiya Putri and Yulita Nilam Fridiyanti, “Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Kendal Pasca Pemilu 2024,” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 7, no. 1 (2024): 13–20.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah keterlibatan politik perempuan di Pemilu Legislatif 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai kuota 30% sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini akan mengkaji peran perempuan dalam pemilu dan bagaimana dinamika politik lokal memengaruhi keterlibatan mereka. Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, partai politik diharuskan mencapai keterlibatan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif.¹⁰ Perspektif *naturallist intellegence* menjadi salah satu faktor yang mendukung pemenuhan kuota keterlibatan perempuan dalam menjadi calon anggota legislatif untuk dapat maju dalam pertarungan politik¹¹. Terutama di negara-negara berkembang, perempuan dan politik sering dianggap sebagai dua hal yang sulit digabungkan. Hal ini disebabkan oleh budaya yang lebih maju, di mana peran perempuan sering kali dibatasi pada lingkup keluarga. Politik, di sisi lain, lebih sering dianggap sebagai tempat yang dekat dengan kekuasaan.¹² Meskipun sudah ada kebijakan afirmatif seperti kuota 30%, perempuan masih menghadapi berbagai kendala sosial dan kultural yang menghambat keterlibatan mereka secara penuh. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak-hak perempuan dibuktikan dengan diratifikasinya berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), tetapi pelaksanaannya di tingkat lokal masih terkendala norma-norma tradisional. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk mendorong partisipasi perempuan di bidang politik melalui pendekatan budaya dan pendidikan yang lebih inklusif.¹³

¹⁰ Isdarma Sahyan and Andi Ainun Annisa Sari, "Menyoal Tindak Lanjut Terkait Keterwakilan Perempuan 30% Pada Pencalonan Anggota Legislatif Pascaputusan MA," *Jurnal Nomokrasi* 1, no. 2 (2023).

¹¹ Nur Arfiyah Febriani, "Perspektif Al-Quran Dan Injil Tentang Kecerdasan Naturalis," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 2 (2017): 223–56.

¹² Ida Syafriyani, Imam Hidayat, and Tasya Fara Marcella, "Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Sumenep (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep)," *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)* 14, no. 2 (2024): 95–107.

¹³ Yuliana Fatmawati, Lingga Abi Rahman, and Muhammad Afriza Rifandy, "Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024): 8532–40.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library study*) untuk mengkaji perempuan yang berpartisipasi dalam politik dalam pemilu legislatif Kalimantan Tengah 2024. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mempelajari pengalaman, tantangan, dan strategi perempuan dalam politik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana wanita menginterpretasikan peran dan kesulitan mereka dalam politik berdasarkan data dan analisis dari sumber Pustaka yang relevan.

B. Pembahasan

B.1. Perempuan dan Politik di Provinsi Kalimantan Tengah

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, adat istiadat budaya serta agama yang bersatu menjadi Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran para perempuan mulai menonjolkan perkembangan jaman yang berarah positif. Mereka mulai terjun kedalam politik pemerintahan yang sebelumnya hanya didominasi oleh para lelaki. Pembahasan mengenai keterlibatan perempuan dalam politik memunculkan permasalahan bagi perempuan itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kehadiran perempuan dalam dunia politik merupakan salah satu tanda kemajuan dan kualitas demokrasi suatu negara.¹⁴

Seringnya keterlibatan perempuan dalam hal publik, selalu menuai banyak kritik dari lingkungan sekitar, terutama tentang peran ganda perempuan ketika dia terlibat dalam hal public dan perannya sebagai ibu rumah tangga untuk keluarga. Nilai-nilai patriarki masih banyak ditemui di berbagai masyarakat, terutama di beberapa daerah, dan menjadi penghambat utama partisipasi politik perempuan.¹⁵

Dalam masyarakat yang sangat patriarki, perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik sering kali kurang mendapat dukungan dari orang-

¹⁴ Indah Tri Handayani, Srie Rosmilawati, and Mambang Mambang, "Peran Perempuan Muhammadiyah Dalam Kepemimpinan Dan Politik Di Kalimantan Tengah: Muhammadiyah Women's Role in Leadership and Politics in Central Kalimantan," *Pencerah Publik* 6, no. 2 (2019): 32–42.

¹⁵ Titin Setiawati and Vilya Dwi Agustini, "Komunikasi Dan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Elektoral," *Jurnal Pustaka Komunikasi* 7, no. 1 (2024): 162–73.

orang di sekitar mereka, termasuk keluarga, komunitas, dan teman perempuan.

¹⁶ Dukungan ini dapat mencakup kebebasan untuk mengejar karir politik, akses terhadap pendidikan politik, atau kesempatan untuk bergabung dengan jaringan politik yang kuat. Tanpa dukungan ini, perempuan akan kesulitan membangun karier politik yang stabil dan sukses. Selain itu, perempuan yang terlibat dalam politik sering kali mendapat kritik yang lebih keras dibandingkan laki-laki, yang beberapa di antaranya mungkin menghambat kemajuan mereka atau menghalangi mereka untuk aktif secara politik.¹⁷

Menanggapi nilai-nilai yang mengekang peran seorang perempuan dilingkungan publik, bersamaan dengan perkembangan zaman, Indonesia menjamin hak-hak perseorangan yang dituangkan dalam Hak Asasi Manusia, yang dimana juga mencakup hak-hak perempuan agar tidak lagi mengalami diskriminasi peran dalam lingkungan public untuk juga ikut berkembang.¹⁸ Komitmen Indonesia terhadap perlindungan dan perwujudan hak-hak perempuan dibuktikan dengan diratifikasinya berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*), *CPRW*, *ICCPR*, dan *ICESCR*, serta undang-undang nasional yang melindungi hak-hak perempuan.¹⁹

Di Provinsi Kalimantan Tengah keterlibatan perempuan dalam dunia politik sudah dibuktikan dengan terpenuhinya kuota 30% dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024. Dalam Keputusan KPU Kal-Teng No. 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁶ Selvia Adriani and Siti Tiara Maulia, "Partisipasi Perempuan Dalam Politik," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 131–36.

¹⁷ Afdal Aperta Safatullah et al., "Merebut Panggung Politik: Menelisik Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Di Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 1 (2024): 10–20.

¹⁸ Vani Wirawan and Ita Rodiah, "Kebijakan Hukum Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Bangsa: Perempuan Dan Politik," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 1 (2024): 103–10.

¹⁹ Fatmawati, Abi Rahman, and Rifandy, "Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen Perspektif Masalah Mursalah."

Provinsi Kal-Teng dalam Pemilu Tahun 2024²⁰, keterlibatan perempuan dalam politik telah memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%. Berdasarkan Putusan KPU Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk 18 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dimana pada tiap partai yang mengajukan calon legislatif, sudah berhasil memenuhi kuota keterwakilan perempuan yang ditetapkan²¹. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik mulai bekerja. Kuota ini tidak hanya angka formal, tetapi juga merupakan representasi dari perjuangan untuk kesetaraan gender dalam struktur politik yang selama ini didominasi oleh laki-laki.

B.2. Peran Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kalimantan Tengah

Peran perempuan dalam pemilu Kalimantan Tengah 2024 sangat penting untuk membangun politik yang lebih adil dan representatif. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu, dengan tujuan untuk melibatkan lebih banyak perempuan dalam politik²² dan pengambilan Keputusan.²³ Perempuan tidak hanya menjadi calon anggota parlemen, namun juga pemilih aktif yang dapat menentukan kebijakan yang berdampak pada isu-isu penting seperti kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Selain itu, banyak perempuan yang berpartisipasi sebagai aktivis dan juru kampanye di organisasi masyarakat, memberikan kontribusi

²⁰ Tengah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

²¹ Tengah.

²² Salman Lubis and Halking Halking, "Persepsi Masyarakat Tentang Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Politik Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 11834–49.

²³ Hartinah Hartinah and Istika Ahdiyanti, "Manajemen Keterlibatan Perempuan Di Ruang Publik Peluang & Tantangan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 2380–90.

terhadap pendidikan dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik. Faktanya, mereka bertindak sebagai petugas yang kembali untuk memastikan prosesnya jujur dan adil. Namun perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya patriarki, kurangnya dukungan partai politik, dan kesulitan keuangan yang menghambat kemajuan partai politik.²⁴

Meski demikian, pemilu tahun 2024 merupakan peluang besar bagi perempuan di Kalimantan Tengah untuk berperan lebih besar dalam politik, terutama mengingat semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Agar perempuan semakin aktif di masa depan dan berperan penting dalam demokrasi, dukungan dari pemerintah, partai politik, dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Di Kalimantan Tengah berdasarkan Putusan KPU Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk 18 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu:²⁵

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

²⁴ Pepy Arianti and M Fachri Adnan, "Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Presiden 2024 Di Kabupaten Pesisir Selatan," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024).

²⁵ Tengah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Garda Republik Indonesia
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai PERINDO
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat

Dengan memasukkan perempuan ke dalam partai politik, institusi politik telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesetaraan gender, terutama di bidang politik, yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Kuota tersebut dicapai, yang tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam perjuangan hak-hak perempuan, tetapi juga menunjukkan adanya tindakan nyata untuk memberikan peluang yang lebih setara bagi perempuan untuk menduduki jabatan dan posisi publik yang strategis. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya kolektif untuk memperbaiki struktur politik dapat memungkinkan partisipasi perempuan yang lebih inklusif dan mendorong untuk memperjuangkan masalah gender dalam kebijakan publik secara lebih luas.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan:²⁶

No	Nama Calon Terpilih	
1.	Habib Sayid Abdul Rasyid	L

²⁶ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (1967).

2.	Agus Pramono, S.Sos	L
3.	Drs. Arton S. Dohong	L
4.	Ir. Lohing Simon	L
5.	Dra. Hj. Siti Nafsiah, M.Si.	P
6.	Faridawaty Darland Atjeh	P
7.	Asdy Narang, S.H., Mcl.	L
8.	Agie, M.Hum.	L
9.	Junaidi, S.Ag.	L
10.	Sengkon, S.E	L
11.	Pipit Setyorini, A.Md.	P
12.	Wengga Febri Dwi Tananda	P
13.	Sutik	L
14.	Ferry Khaidir	L
15.	Yeni Maria Marselina Kahta	P
16.	Rahadian Fani	L
17.	H. Sudarsono, S.H., M.A.P.	L
18.	Toga Hamonangan Nadeak, S.H., M.H.	L
19.	Abdul Hafid, S.Pi.	L
20.	Hero Harapanno Mandouw	L
21.	Drs. H. Sugiyarto, M.A.P.	L
22.	Maryani Sabran	P
23.	Riska Agustin, S.Ak.	P
24.	H. M. Rusdi Gozali, S.P., M.M.	L
25.	Okki Maulana	L
26.	Bryan Iskandar, S.E.	L
27.	Heri Santoso	L

28.	Ir. Habib Sayid Abdurrahman, M.M.	L
29.	Muhammad Ansyari	L
30.	Dr. Ampera A. Y. Mebas, S.E., M.M.	L
31.	Yetro Midel Yoseph	L
32.	Purdiono, S.E.	L
33.	Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom	L
34.	Armada, S.E.	L
35.	H. Jimmy Carter	L
36.	Kasri Yani	P
37.	Sayyid Muhammad Zein	L
38.	H. Helmi, S.Ag.	L
39.	H. Wiyatno, S.P.	L
40.	Muhammad Alfian Mawardi, S.H.	L
41.	Bambang Irawan, S.St.Pi.	L
42.	Hj. Noor Fazariah Kamayanti, S.E., M.A.	P
43.	Raudah, S.Pd.	P
44.	Tomy Irawan Diran, S.E.	L
45.	Ir. H. Muhajirin, M.P.	L
Jumlah Laki-laki :		35
Jumlah Perempuan :		10
Keterwakilan Perempuan : 22,22%		

Berdasarkan data yang telah disajikan, keterwakilan perempuan pada keterlibatan Politik di Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah belum lah memenuhi kuota karena masih berada dibawah persentase 30%. Data menunjukkan bahwa hanya 22,22% perempuan yang terdaftar sebagai calon legislatif terpilih di provinsi ini. Dalam hal ini, meskipun kuota

tersebut telah dipenuhi dalam daftar calon tetap (DCT), jumlah anggota parlemen perempuan lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan perempuan dalam proses pencalonan belum sepenuhnya tercermin dalam bagaimana mereka dipilih.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ada masalah struktural yang terus menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Perempuan sering kali tidak dapat mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan partai politik karena elemen budaya seperti patriarki yang kuat.²⁷ Selain itu, hambatan keuangan dan ketidakmampuan perempuan untuk mengakses jaringan politik yang kuat juga menjadi hambatan besar dalam meningkatkan peluang mereka untuk dipilih.²⁸ Situasi ini menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang yang mengatur kuota gender telah dibuat, masih ada ruang untuk diperbaiki. Ini terutama berlaku untuk mengubah paradigma sosial dan budaya yang menghalangi perempuan untuk maju dalam politik.

B.3. *Naturalist Intelligence* Perempuan Versus Politik Praktis Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kalimantan Tengah

Peran dan kedudukan perempuan sering didiskriminasi, terutama dalam ranah politik, yang seharusnya merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap orang. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan keterwakilan perempuan dalam bidang politik²⁹. Perempuan di parlemen Indonesia memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik dan pembuatan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama perempuan³⁰. Khususnya di negara-negara berkembang, perempuan masih sulit

²⁷ Muahammad Faisal et al., "2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia: (Hambatan Perempuan Dalam Budaya Patriarki)," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 55–60.

²⁸ Assidqi and Ilham, "Hambatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Lokal: Analisis Kegagalan Endang Kusumawaty Dalam Pemilihan Walikota Kota."

²⁹ Fatimah Azzahra Kaloko, Nazila Riski Hayati, and Riri Maria Fatriani, "Problematisasi Perempuan Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024): 144–50.

³⁰ Diskominfo Kota Bandung, "Perempuan Di Legislatif, Harmonisasi Empati Dan Logika Dalam Sejahteraan Masyarakat," Portal Jabarprov.go.id, 2023, <https://jabarprov.go.id/berita/perempuan-di-legislatif-harmonisasi-empati-dan-logika-dalam-sejahteraan-masyarakat-10042>.

diterima untuk terlibat dalam politik³¹. Hingga saat ini, kaum laki-laki cenderung mendominasi politik, sedangkan perempuan sering kali hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam kehidupan publik yang berdampak pada kepentingan umum.³²

Sedikitnya keterwakilan Perempuan dalam parlemen didasarkan pada banyak nya partai politik yang masih belum sepenuhnya mendukung kandidat perempuan, dan seringkali mereka ditempatkan pada posisi yang kurang strategis. Selain itu, masyarakat dan budaya yang bersifat patriarki tidak mendukung perempuan untuk memegang peran politik yang lebih tinggi. Seringkali perempuan menghadapi kesulitan untuk bersaing dengan kandidat laki-laki karena masalah keuangan atau pendidikan politik yang rendah. Di sisi lain, karena perempuan dalam politik relatif baru dan banyak pendatang baru, mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan politik dan menghadapi pesaing laki-laki yang lebih dominan dalam lingkungan politik.³³ Namun, menurut Femmy Eka Kartika Putri, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud), mengatakan dalam wawancaranya, “Pemerintah terus berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dengan meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen menjadi 30% dan menghilangkan kesenjangan gender dalam politik”.³⁴

Pada lembaga legislatif di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, keterwakilan anggota perempuan terbilang kecil. Hal ini dapat dilihat berdasarkan periode 2024 keterwakilan perempuan hanya 10 orang, yaitu sebanyak 22,22% yang dimana persentase kuota terpenuhinya masih berada dibawah 30% atau artinya

³¹ Putri Nadia, “Tantangan Perempuan Dalam Arus Politik Perempuan Indonesia,” Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024, <https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/>.

³² Mhd Latip Kahpi and Asriana Harahap, “Analisis Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia: Faktor Penghambat Dan Pendorong,” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2024): 64–77.

³³ Citra Dewi Agustin and Dyah Ayu Nurhayati Asih, “Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Politik,” *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 41–50.

³⁴ Madinah Almunawara, “Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Penting Bagi Kemajuan Kesetaraan Gender,” 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>.

adalah belum terpenuhi meskipun antusiasme Perempuan Kalimantan Tengah untuk melibatkan diri dalam Politik terbilang tinggi, terbukti dengan terpenuhinya kuota 30% keterlibatan perempuan dalam politik di pencalonan 18 partai politik yang ada di Kalimantan Tengah.³⁵ Perempuan yang berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan ciri-ciri Wawasan Naturalis, seperti pemahaman mereka tentang lingkungan sosial dan politik. Howard Gardner menciptakan konsep kecerdasan naturalistik dalam kerangka Multiple Intelligences, yang menekan kemampuan seseorang untuk membedakan dan memahami pola-pola yang ada di lingkungannya terutama dalam lingkungan politik.³⁶ Jika dikaitkan dengan konteks politik, kecerdasan naturalis dapat berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memahami perubahan dalam dinamika lingkungan sosial, budaya, dan politik.³⁷

Perempuan yang terlibat dalam politik harus mampu memahami dinamika masyarakat, termasuk norma budaya, persepsi gender, dan masalah struktural yang menghambat keterwakilan mereka dalam sistem politik yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Perempuan memanfaatkan kecerdasan naturalis untuk menemukan kesulitan dan menemukan solusi terbaik. Strategi kampanye perempuan yang maju dalam pemilu legislatif harus disesuaikan dengan masyarakat mereka. Untuk memahami kebutuhan pemilih, kecerdasan naturalis memanfaatkan masalah yang dekat dengan kehidupan masyarakat seperti kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan kesehatan. Metode ini dapat digunakan untuk melihat keterlibatan politik perempuan di Kalimantan Tengah dari sudut pandang peraturan dan kebijakan yang mendukung, serta dari sudut pandang bagaimana perempuan menggunakan kecerdasan naturalis mereka untuk mengatasi berbagai tantangan politik.

³⁵ Tengah.

³⁶ Ifan Prasya, "Apa Itu Kecerdasan Lingkungan (Naturalist Intelligence)?," 28 November 2024, 2024, <https://studiliv.com/kecerdasan-lingkungan/>.

³⁷ widiastuti, "Apa Itu Kecerdasan Naturalis Dan Tips Mengoptimalkannya Pada Anak," Gramedia, 2022, <https://www.gramedia.com/best-seller/kecerdasan-naturalis/>.

Meski begitu, selain karena faktor lingkungan sosial dan budaya patriarki Masyarakat, pada kenyataannya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk 18 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap terpenuhi 30% kuota Perempuan setiap partainya. Namun yang menjadi faktor utama hambatan terpenuhinya 30% kuota Perempuan dalam legislatif dalam keterpilihannya adalah adanya Politik Praktis dalam Pemilu. Rahmat Bagja, ketua Bawaslu RI menyebutkan dalam konferensi pers update Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024, terdapat 479 pelanggaran, 324 bukan termasuk pelanggaran, dan 220 yang masih dalam proses penanganan pelanggaran. Jenis pelanggarannya adalah 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya”.³⁸

Politik praktis mengacu pada semua tindakan politik yang memengaruhi masyarakat dan pemerintahan. Tindakan politik individu atau kelompok untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara disebut politik praktis.³⁹ Politik praktis umumnya sering terjadi selama pelaksanaan pesta Demokrasi khususnya dalam pemilu legislatif di tingkat nasional dan regional, maupun dalam pemilihan kepala desa di tingkat lokal. Dinamika politik dari proses seleksi ini cenderung meningkatkan ketegangan, terutama ketika hanya ada dua kandidat yang bersaing. Politik praktis sering dianggap berbahaya karena sering digunakan untuk menghambat strategi dan taktik lawan politik. Dalam praktiknya, politik praktis sering dikaitkan dengan konsekuensi negatif terhadap dinamika perpolitikan.⁴⁰ Dalam hal ini, ketika kecerdasan naturalist nya telah terpenuhi, namun kenyataan fakta pada lapangannya berhadapan dengan politik praktis yang tanpa secara langsung didukung dengan adanya budaya patriarki dalam lingkungan sosial Masyarakat tentu saja menjadi alasan

³⁸ Robi Ardianto, “Registrasi 1.023 Temuan Dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024,” Berita Bawaslu, 2024, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.

³⁹ Eko Setiawan, “Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat,” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 1–17.

⁴⁰ Sumarta Sumarta, “Nu Antara Politik Praktis Dan Khittah,” *Khulasah: Islamic Studies Journal* 4, no. 1 (2022): 1–13.

dari terpilihnya 22,22% Perempuan dari lebih 30% calon legislatif Perempuan yang mendaftar.

Hal ini terjadi pada Keterlibatan Perempuan dalam Pemilu tahun 2024 provinsi Papua Barat, dalam fakta lapangannya hanya 17,39% Persentase Keterwakilan Perempuan.⁴¹ Kalimantan Tengah memiliki partisipasi perempuan 22,22% dalam politik, yang artinya lebih tinggi dari Papua Barat. Perbedaan ini menunjukkan kesenjangan dalam partisipasi gender di dua provinsi yang mungkin disebabkan oleh variabel politik sosial, budaya dan adat lokal kedua daerah tersebut. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan persentase keterwakilan Perempuan sebanyak 40,00% yang dimana kesadaran dalam Lingkungan Sosial budaya masyarakatnya terhadap Partisipasi Perempuan dalam politik jauh lebih meningkat. Tidak hanya dukungan dari partai politiknya saja tetapi juga kesadaran Masyarakat terhadap kesetaraan gender menjadi faktor utama terpenuhinya kuota keterlibatan Perempuan dalam politik sebanyak 30%.

Peneliti berpendapat bahwa berdasarkan hal-hal diatas keterwakilan Perempuan dalam parlemen di Kalimantan Tengah memiliki dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Misalnya dampak negatifnya adalah tidak terpenuhinya kuota parlemen sebanyak 30% meskipun pada pencalonannya terpenuhi. Sedangkan dampak positifnya adalah, adanya pendatang baru yang dimana dalam 10 orang yang terpilih sebagai pendatang baru menggunakan *naturalist intelligence*, di mana mereka menyesuaikan strategi kecerdasan *naturalist* untuk menarik minat Masyarakat dalam terhadap pasangan calon. Menurut Peneliti, pemikiran Robert Bierstedt dalam bukunya "The Social Order" memiliki keterkaitan dengan *Naturalist Intelligence* terhadap pendatang baru, dimana mereka harus mendapatkan *Habituatation*⁴² atau pembiasaan perilaku, di mana individu harus mematuhi hukum karena telah menjadi bagian dari

⁴¹ Admin KPU, "Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota," Kpu, 2024, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko_pemutakhiran_parpol/kabko_parpol/76/3516.

⁴² Robert Bierstedt, *The Social Order*, Third Edit (Bombay-New Delhi: TATA MCGRAW-HILL PUBLISHING CO. LTD, 1970).

rutinitas mereka, seperti kebiasaan menggunakan helm saat berkendara. Sedangkan untuk mereka yang terpilih Kembali (incumbent), sudah bisa mendapatkan kepercayaan Masyarakat terhadap stigma patriarki masyarakat sehingga dapat Kembali terpilih dalam pemilu legislatif, dimana kecerdasan naturalist nya telah berkembang lebih tinggi yang juga memiliki keterkaitan erat dengan Prinsip utility atau pemanfaatan dari kaidah yang dipatuh, di mana individu melihat manfaat nyata dari mematuhi hukum⁴³. Dalam hal ini, keterwakilan Perempuan di pemilu legislatif provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 terbilang cukup tinggi mengingat keterwakilan Perempuan pada pemilu legislatif provinsi papua barat hanya 17,39%, lebih kecil dari Provinsi Kalimantan Tengah yang 22,22%. Selain itu, tidak hanya terpenuhinya kecerdasan naturalist pada Perempuan, juga dibutuhkan kesadaran Masyarakat terhadap kesetaraan gender yang dapat menunjang lebih banyak partisipasi Perempuan dalam politik guna menegakkan hak-hak Perempuan dan mengurangi adanya kecurangan dalam politik seperti politik praktis.

C. Penutup

Keterlibatan perempuan dalam legislatif di Kalimantan Tengah menunjukkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Meskipun kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam daftar calon legislatif Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilu 2024 telah terisi, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD hanya 22,22%, menunjukkan bahwa perempuan masih banyak tantangan dalam politik, termasuk budaya patriarki, kurangnya dukungan dari partai politik, dan pengaruh politik praktis. Disamping itu, perempuan yang terlibat dalam politik menunjukkan kecerdasan naturalistik, di mana terdapat incumbent perempuan yang bertahan dapat dikategorikan ke dalam utility dalam teori kepatuhan hukum Robert Bierstedt yang artinya memanfaatkan hukum yang ada, sedangkan pendatang baru dalam legislatif di Kalimantan Tengah menunjukkan habituation yang efektif dalam pembiasaan perilaku politik yang mendorong mereka ke dalam parlemen. Dibandingkan dengan daerah lain,

⁴³ Robert Bierstedt.

seperti Papua Barat (17,39%) dan Sulawesi Selatan (40%), tingkat keterwakilan perempuan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan dukungan masyarakat terhadap kesetaraan gender. Sehingga diperlukan pendidikan politik, dukungan partai politik, dan kampanye kesadaran gender yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat.

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk membandingkan Kalimantan Tengah dengan provinsi lain, seperti Sulawesi Selatan, yang memiliki preferensi perempuan yang lebih tinggi, dan Papua Barat, yang memiliki preferensi perempuan yang lebih rendah. Perbandingan ini akan memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kondisi sosial, budaya, dan politik mempengaruhi kemenangan perempuan dalam pemilu legislatif. Selain itu, sangat penting untuk melibatkan calon legislatif perempuan, baik yang terpilih maupun yang tidak, melalui wawancara untuk mengetahui pengalaman mereka, kesulitan mereka, dan cara mereka menangani praktik politik yang tidak sehat dan budaya patriarki. Selain itu, penelitian tentang bagaimana kondisi ekonomi dan akses ke jaringan politik mempengaruhi peluang perempuan untuk terpilih juga penting. Terakhir, perlu dilakukan analisis menyeluruh tentang hasil afirmasi kebijakan seperti kuota 30% untuk menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar dapat meningkatkan representasi perempuan atau hanya memenuhi aturan administratif.

Daftar Pustaka

- Adriani, Selvia, and Siti Tiara Maulia. "Partisipasi Perempuan Dalam Politik." *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 131–36.
- Agustin, Citra Dewi, and Dyah Ayu Nurhayati Asih. "Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Politik." *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 41–50.
- Ardianto, Robi. "Registrasi 1.023 Temuan Dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024." *Berita Bawaslu*, 2024.
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.
- Arianti, Pepy, and M Fachri Adnan. "Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Presiden 2024 Di Kabupaten Pesisir Selatan." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024).
- Arjani, Ni Luh. "Kesetaraan Gender Di Bidang Politik Antara Harapan Dan Realita." *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 5, no. 1 (2021): 1–6.
- Assidqi, A A, and T Ilham. "Hambatan Keterpilihan Perempuan Dalam Politik Lokal: Analisis Kegagalan Endang Kusumawaty Dalam Pemilihan Walikota Kota." *Jurnal Syariah* 29, no. 3 (2024): 481–508.
[http://eprints.ipdn.ac.id/17839/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/17839/1/Ariq Abrar Assidqi_31.0255_HAMBATAN KETERPILIHAN PEREMPUAN DALAM POLITIK LOKAL ANALISIS KEGAGALAN ENDANG KUSUMAWATY DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/17839/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/17839/1/Ariq%20Abrar%20Assidqi_31.0255_HAMBATAN%20KETERPILIHAN%20PEREMPUAN%20DALAM%20POLITIK%20LOKAL%20ANALISIS%20KEGAGALAN%20ENDANG%20KUSUMAWATY%20DALAM%20PEMILIHAN%20WALIKOTA%20PANGKALPINANG%20TAHUN%202018.pdf).
- Diskominfo Kota Bandung. "Perempuan Di Legislatif, Harmonisasi Empati Dan Logika Dalam Sejahteraan Masyarakat." *Portal Jabarprov.go.id*, 2023.
<https://jabarprov.go.id/berita/perempuan-di-legislatif-harmonisasi-empati-dan-logika-dalam-sejahteraan-masyarakat-10042>.
- Faisal, Muahammad, Muhammad Zhuhri Fachyuzar, Putriani Lumbangaol, and Andreas Sihombing. "2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia:(Hambatan Perempuan Dalam Budaya

- Patriarki)." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 55–60.
- Fatmawati, Yuliana, Lingga Abi Rahman, and Muhammad Afriza Rifandy. "Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024): 8532–40.
- Febriani, Nur Arfiyah. "Perspektif Al-Quran Dan Injil Tentang Kecerdasan Naturalis." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 2 (2017): 223–56.
- Gusmansyah, Wery. "Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2019).
- Handayani, Indah Tri, Srie Rosmilawati, and Mambang Mambang. "Peran Perempuan Muhammadiyah Dalam Kepemimpinan Dan Politik Di Kalimantan Tengah: Muhammadiyah Women's Role in Leadership and Politics in Central Kalimantan." *Pencerah Publik* 6, no. 2 (2019): 32–42.
- Hartinah, Hartinah, and Istika Ahdiyanti. "Manajemen Keterlibatan Perempuan Di Ruang Publik Peluang & Tantangan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 2380–90.
- Kahpi, Mhd Latip, and Asriana Harahap. "Analisis Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia: Faktor Penghambat Dan Pendorong." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2024): 64–77.
- Kaloko, Fatimah Azzahra, Nazila Riski Hayati, and Riri Maria Fatriani. "Problematisasi Perempuan Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024): 144–50.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (1967).
- KPU, Admin. "Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota." Kpu,

2024.

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko_pemutakhiran_parpol/kabko_parpol/76/3516.

Lubis, Salman, and Halking Halking. "Persepsi Masyarakat Tentang Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Politik Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 11834–49.

Mabruri Pudyas Salim. "Pemilu Legislatif Adalah Pemilu Untuk Memilih Anggota? Pahami Sistemnya." 22 Februari 2024, 2024.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5533574/pemilu-legislatif-adalah-pemilu-untuk-memilih-anggota-pahami-sistemnya>.

Madinah Almunawara. "Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Penting Bagi Kemajuan Kesetaraan Gender," 2023.

<https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>.

Nadia, Putri. "Tantangan Perempuan Dalam Arus Politik Perempuan Indonesia." Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024. <https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/>.

Prasya, Ifan. "Apa Itu Kecerdasan Lingkungan (Naturalist Intelligence)?" 28 November 2024, 2024. <https://studiliv.com/kecerdasan-lingkungan/>.

Putri, Susi Widiya, and Yulita Nilam Fridiyanti. "Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Kendal Pasca Pemilu 2024." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 7, no. 1 (2024): 13–20.

Rachmawati, Etika, Maulana Arief, and Widiyatmo Ekoputro. "Patriarki Sebagai Upaya Counter Hegemony Budaya Male Gaze Di Indonesia." In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MAHASISWA KOMUNIKASI (SEMAKOM)*, 2:95–104, 2024.

Robert Bierstedt. *The Social Order*. Third Edit. Bombay-New Delhi: TATA McGRAW-HILL PUBLISHING CO. LTD, 1970.

- Safatullah, Afdal Aperta, Fery Chofa, Muhmmad Vahlepi, Ego Mulia Saputra, M Abdi Hikmara, and Maylaffnatisya Kholdaa. "Merebut Panggung Politik: Menelisik Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Di Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11, no. 1 (2024): 10–20.
- Sahyan, Isdarma, and Andi Ainun Annisa Sari. "Menyoal Tindak Lanjut Terkait Keterwakilan Perempuan 30% Pada Pencalonan Anggota Legislatif Pascaputusan MA." *Jurnal Nomokrasi* 1, no. 2 (2023).
- Setiawan, Eko. "Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 1–17.
- Setiawati, Titin, and Vilya Dwi Agustini. "Komunikasi Dan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Elektoral." *Jurnal Pustaka Komunikasi* 7, no. 1 (2024): 162–73.
- Sitorus, Handro Kurnia, Alwi Setiawati, Balqis Vifania, Nabila Mahrani, and Muhammad Yasir. "Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 02 (2024).
- Subitmele, Silvia Estefina. "Pemilu Legislatif Adalah Momen Penting Dalam Sistem Demokrasi, Simak Perbedaannya." 17 Januari 2024, 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5507320/pemilu-legislatif-adalah-momen-penting-dalam-sistem-demokrasi-simak-perbedaannya>.
- Sumarta, Sumarta. "Nu Antara Politik Praktis Dan Khittah." *Khulasah: Islamic Studies Journal* 4, no. 1 (2022): 1–13.
- Syafriyani, Ida, Imam Hidayat, and Tasya Fara Marcella. "Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Sumenep (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep)." *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)* 14, no. 2 (2024): 95–107.
- Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan. Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2023
Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (2023).
widiastuti. “Apa Itu Kecerdasan Naturalis Dan Tips Mengoptimalkannya Pada
Anak.” Gramedia, 2022. [https://www.gramedia.com/best-
seller/kecerdasan-naturalis/](https://www.gramedia.com/best-seller/kecerdasan-naturalis/).
Wirawan, Vani, and Ita Rodiah. “Kebijakan Hukum Partisipasi Perempuan
Dalam Pembangunan Bangsa: Perempuan Dan Politik.” *Bureaucracy
Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 1
(2024): 103–10.